

EVALUASI PENERAPAN SISTEM POIN DALAM MENDISIPLINKAN SISWA
DI SMAN 1 CANDUANGYusra¹, Darul Ilmi², Supratman Zakir³ Emeliazola⁴¹²³Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi¹Email Korespondensi: yusra60@guru.sma.belajar.id

Abstrak. Lembaga pendidikan selalu berupaya meningkatkan kualitas pendidikannya salah satunya yaitu mendisiplinkan siswanya. Sebuah lembaga pendidikan harus memikirkan langkah yang harus dilakukan supaya siswanya lebih bisa lagi disiplin. Salah satu caranya yaitu membuat sebuah program untuk menegakkan kedisiplinan seperti penerapan sistem poin di lembaga pendidikan tersebut. Setelah diterapkan sebuah program maka sebuah lembaga pendidikan harus melakukan evaluasi supaya bisa melihat bagaimana pengaruh program tersebut supaya bisa di inovasi kembali program tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki penggunaan sistem poin sebagai ukuran disiplin bagi siswa di SMAN 1 Canduang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan teknik evaluasi CIPP. Cara mendapatkan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk pengumpulan data. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem poin sebagai langkah disiplin bagi siswa tidak konsisten dengan aturan dan konsep yang sudah mapan. Rekaman hanya berfungsi sebagai formalitas, tanpa tindakan selanjutnya yang diambil oleh instruktur bimbingan mentor sekolah. Penerapan sistem poin hanya berlaku untuk semester Januari-Juni 2021. Setelah periode ini, sistem menjadi tidak aktif dan hanya konsekuensi langsung, seperti membaca Al-Qur'an dan membersihkan lahan sekolah, akan dikenakan pada siswa.

Kata Kunci: Evaluasi, Mendisiplinkan siswa, lembaga pendidikan

Abstract. Educational institutions always try to improve the quality of their education, one of which is disciplining their students. An educational institution must think of steps to take so that students can be more disciplined. One way is to create a programme to enforce discipline such as implementing a point system in the educational institution. After implementing a programme, an educational institution must conduct an evaluation so that it can see how the effect of the programme is so that the programme can be innovated again. The purpose of this study is to investigate the use of point system as a measure of discipline for students at SMAN 1 Canduang. This study uses qualitative research methods and uses CIPP evaluation techniques. How to get the data using interview, observation, and document analysis techniques for data collection. The findings of this study indicate that the implementation of the point system as a discipline measure for students is inconsistent with established rules and concepts. The recording only serves as a formality, with no subsequent action taken by the school mentor guidance instructor. The implementation of the point system is only valid for the January-June 2021 semester. After this period, the system becomes inactive and only direct consequences, such as reciting the Qur'an and cleaning the school grounds, will be imposed on students.

Keywords: *Evaluation, Disciplining Students, Educational Institutions*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah sistem yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan keseluruhan kualitas keberadaan manusia. Sepanjang sejarah manusia, hampir setiap masyarakat manusia telah menggunakan pendidikan sebagai metode untuk memelihara dan meningkatkan kualitas secara keseluruhan. Pendidikan adalah penting untuk membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab mereka di masa depan. Pendidikan adalah metode yang paling efektif untuk memupuk generasi baru pengemudi muda yang akan mempertahankan hubungan yang kuat dengan

warisan budaya mereka. Peningkatan kualitas pendidikan memfasilitasi pencapaian tujuan pendidikan nasional, yang meliputi memupuk iman dan penghormatan siswa terhadap sang pencipta, menumbuhkan bangsawan mereka, mempromosikan kesejahteraan fisik mereka, memperluas pengetahuan mereka, menyempurnakan keterampilan komunikasi mereka, mendorong kreativitas mereka, dan memelihara rasa demokrasi dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. (Gusli et al., 2023)

Untuk memenuhi tujuan yang disebutkan di atas, undang-undang baru telah diperkenalkan untuk meningkatkan nilai-nilai moral di bidang pendidikan di Indonesia. Hal ini dilakukan melalui implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, yang berfokus pada penguatan pendidikan karakter di lembaga pendidikan formal, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat 1. Mengingat prevalensi perilaku bermasalah di antara siswa, seperti bullying dan persaingan, sangat penting untuk memprioritaskan pendidikan karakter dalam lanskap pendidikan saat ini. Perilaku ini tidak menunjukkan individu yang berpendidikan dan perlu ditangani. (Soedarsono, 2013) Menumbuhkan karakter bangsa adalah kewajiban kolektif yang jatuh pada banyak entitas, termasuk orang tua, lembaga pendidikan, komunitas, dan pemerintah. Sekolah, sebagai lembaga pendidikan formal, harus memiliki kemampuan untuk memprediksi perubahan dinamis di era saat ini. Sekolah membutuhkan peraturan untuk mengatur perilaku komunitas sekolah sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Sekolah harus menerapkan hukuman yang ketat untuk mencegah siswa dari melakukan pelanggaran. Hal ini dapat dicapai dengan menetapkan program yang menekankan pentingnya mempertahankan tingkat disiplin yang tinggi di antara siswa. (Setyawan et al., 2017)

Sekolah adalah lembaga pendidikan penting yang memainkan peran penting dalam pelaksanaan pendidikan. Sekolah memainkan peran penting dalam mendidik dan meningkatkan perilaku siswa dalam pengaturan komunitas. Hal ini dapat dilihat dalam implementasi peraturan atau langkah-langkah kontrol di lembaga pendidikan (Akhyar, Batubara, et al., 2024). Peran dan tujuan dari perintah yang ditetapkan sekolah adalah untuk merumuskan dan mendefinisikan perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, serta untuk menetapkan batasan berdasarkan standar etika dan harapan perilakunya yang baik. Semua anggota komunitas sekolah, termasuk siswa, diminta untuk mematuhi aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh sekolah. Disiplin memainkan peran penting dalam membentuk karakter siswa, menjadikannya aspek penting dari pengembangan mereka. Disiplin adalah sifat karakter yang mencakup sikap, dorongan, dan bakat siswa. Ini adalah persyaratan penting untuk pembentukan dan perkembangan karakter yang sehat. Disiplin adalah kunci dalam manajemen diri. (Ipnu Wulandari, 2020)

Sekolah diselenggarakan secara sistematis untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan terstruktur. Namun, kasus gangguan sering berkejang tanpa konsekuensi apapun. Menggunakan sistem titik-titik pelanggaran untuk menegakkan ketertiban dan mencegah perilaku siswa yang tidak sopan. Tujuan utama adalah untuk melatih siswa untuk mematuhi standar dan aturan dengan pemahaman yang mendalam, bukan hanya kepatuhan permukaan. (Gusli et al., 2024) Selain itu, ditegaskan bahwa mempertahankan ketertiban dan mematuhi norma-norma memiliki dampak yang menguntungkan, mempromosikan ketergantungan diri siswa, ketaatan, pemeliharaan perintah sekolah, komunikasi sopan, dan perawatan bersama.

Tujuan utama dari membangun sistem lembaga pendidika yang terorganisir dengan baik adalah untuk secara efektif mengatur perilaku semua siswa, menguraikan tindakan yang dibenarkan dan tidak dibenarkan. Siswa yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi tergantung pada akumulasi poin yang ditentukan. (Akhyar, Iswantir, et al., 2024) Salah satu tanggung jawab utama guru bimbingan adalah untuk memberikan layanan kepada semua siswa mengenai norma dan peraturan sekolah, serta konsekuensi dari pelanggaran aturan ini. Ini adalah aspek penting dari layanan pencegahan dan pengembangan. (Mallaena et al., 2023) Salah satu metode yang digunakan oleh sekolah untuk menegakkan disiplin di antara siswa adalah penerapan sistem poin. (Sari et al., 2023) Implementasi sistem poin diperintahkan oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Manajemen Pendidikan, yang mengharuskan sekolah/madrasah untuk mengembangkan aturan yang jelas untuk mendorong suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan yang tepat. (Desiyanto et al., 2018) Sistem poin adalah inisiatif yang dilaksanakan oleh sekolah untuk meningkatkan disiplin siswa. (Fitriawati et al., 2017)

Sistem ini mengkategorikan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa di kedua pengaturan sekolah, termasuk masalah yang berkaitan dengan kehadiran, keterlambatan, konsistensi, dan perilaku. Ini juga mencatat hukuman yang dikenakan dan hadiah numerik yang diperoleh. Siswa yang melakukan pelanggaran akan dihukum dengan deduksi. Setiap aturan diberikan poin yang bervariasi berdasarkan keparahan pelanggaran kecil. Jika seorang siswa melakukan pelanggaran, skor mereka akan meningkat. Namun, jika siswa unggul di bidang akademik dan non-akademik, poin akan turun. (Chrismayanti et al., 2022)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian evaluatif menggunakan model evaluasi CIPP. Penelitian kualitatif sangat dianjurkan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena sosial dengan mengumpulkan data mendalam dari perspektif individu yang terlibat. Informan dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah, waka kesiswaan, waka sarana dan prasarana, guru Bk, Guru, dan Guru piket. (Sukmadinata, 2007) Para peneliti menggunakan model penilaian dalam penelitian ini. Evaluasi adalah proses sistematis yang melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk menentukan nilai atau manfaat dari praktek tertentu. (Mudjiyanto, 2018) Dengan demikian, peneliti menggunakan model CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam untuk menganalisis penerapan sistem poin sebagai ukuran disiplin bagi siswa dalam SMAN 1 Canduang. Peneliti menggunakan teknik sampling khusus untuk memilih subyek penelitian yang dapat memberikan informasi yang relevan tentang fenomena dan masalah yang ditangani dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan metodologi pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. (Sugiyono, 2020) Lokasi penelitian ini yaitu di SMAN 1 Canduang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Context (Konteks) Program Sistem Poin Landasan Hukum Penerapan Sistem Poin

Program sistem poin yang di buat oleh SMAN 1 Canduang adalah program sekolah yang telah dirancang melalui keputusan kolektif yang dibuat oleh seluruh staf pendidikan di sekolah. Peneliti melakukan wawancara dengan kepala sekolah SMAN 1 Canduang beliau berkata: sistem poin didasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh seluruh guru SMAN 1 Canduang atau melalui peraturan sekolah yang secara kolektif dibuat oleh guru di sekolah menengah kami. Selanjutnya wawancara dengan waka kesiswaan seorang individu

berpengetahuan yang diwawancarai di SMAN 1 Canduang juga memberikan informasi yang sama mengenai alasan hukum untuk implementasi sistem poin. Kata beliau, basis hukum Sistem Poin adalah program sekolah yang dikembangkan melalui kesepakatan dengan sidang guru di dalam sekolah merujuk kepada UU no 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara landasaan hukum dalam penerapan sistem poin yaitu kesepakatan hasil bersama dengan majelis guru yang merujuk pada UU No 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan.

Latar Belakang Penerapan Sistem Poin di SMAN 1 Canduang

Penerapan sistem poin ini berasal dari meningkatnya jumlah pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh siswa setelah munculnya pandemi COVID-19. Setelah melanjutkan pembelajaran secara pribadi, siswa sering terlibat dalam pelanggaran disiplin. Akibatnya, waka kesiswaan dan administrator sedang merancang program sistem poin. Informant wakil kesiswaan memberikan pernyataan di mana kepala SMAN 1 Canduang menjelaskan bahwa sistem poin dilaksanakan karena penurunan kehadiran siswa dan hilangnya disiplin yang disebabkan oleh adanya Covid-19. Waka kesiswaan, dalam kolaborasi dengan pembangun sumbu, mengembangkan program sistem titik berdasarkan fenomena yang disebutkan di atas. Menurut informant guru dari BK SMAN 1 Canduang, tujuan penerapan sistem poin ini adalah untuk mengurangi jumlah pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh siswa. Ini karena siswa di SMAN 1 Canduang telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mempertahankan disiplin. Mereka sering datang terlambat ke sekolah karena berbagai alasan, mengakibatkan anak-anak yang melanggar aturan ini didokumentasikan untuk mencegah pelanggaran berulang pada hari berikutnya. Karena alasan ini, sekolah secara proaktif mengambil tugas mengembangkan program sistem poin ini. Wawancara dengan informant menunjukkan bahwa penerapan sistem poin di SMAN 1 Canduang adalah respons terhadap meningkatnya jumlah pelanggaran disiplin harian oleh siswa. Masalah ini telah diperburuk oleh wabah Covid-19, yang telah mengakibatkan penurunan disiplin siswa. Sebuah program dikembangkan untuk menangani masalah siswa yang datang terlambat ke sekolah dan memasuki fasilitas sekolah seperti yang mereka inginkan. Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi tingkat pelanggaran perintah dan menyederhanakan proses pengolahan pelanggaran tersebut yang dilakukan oleh siswa. Ini secara khusus berfokus pada guru pada tugas selama jadwal yang ditentukan, yang dikenal sebagai piket guru.

Berdasarkan wawancara yang disebutkan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan sistem poin di SMAN 1 Canduang dikaitkan dengan terjadinya wabah covid-19, yang telah mengakibatkan penurunan disiplin siswa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kristian..et al, 2022) berjudul "Implementasi Sistem Titik Pelanggaran untuk Meningkatkan Disiplin Siswa di Sekolah Tinggi Negeri Tana Toraja Kelima. Studi ini memeriksa alasan di balik implementasi sistem poin untuk mempertahankan disiplin siswa dan menyederhanakan manajemen pelanggaran siswa. Temuan dalam penelitian menunjukkan kesamaan, karena mereka juga menerapkan sistem poin untuk mengurangi frekuensi pelanggaran pesanan siswa.

Tujuan Penerapan Sistem Poin di SMAN 1 Canduang

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah beliau mengatakan, sistem poin melayani tujuan meningkatkan disiplin siswa, mendorong rasa tanggung jawab pada siswa, meminimalkan pelanggaran disiplin, menyederhanakan pengelolaan kelalaian siswa, dan menciptakan efek penghalang bagi siswa yang tidak mematuhi aturan. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan waka kesiswaan, penerapan sistem poin ini bertujuan untuk menyederhanakan penanganan pelanggaran siswa, memberikan kejelasan dalam proses disiplin, mempromosikan disiplin di antara siswa, dan mempersiapkan mereka untuk menjadi individu yang disiplin baik dalam lingkungan sekolah dan dalam upaya profesional masa depan mereka. Tujuannya adalah untuk konsekuensi-konsekuensi untuk memiliki pengaruh yang merugikan pada siswa, sehingga menghindari mereka dari pelanggaran lebih lanjut dari

peraturan sekolah. Namun, saya melihat bahwa denda hanya dikenakan pada anak-anak terlambat, yang secara khusus ditugaskan untuk membersihkan ruang sekolah sebagai akibatnya, tetapi masih diizinkan untuk menghadiri. Rekrutmen tidak lagi dilakukan, oleh karena itu jumlah poin yang diperoleh oleh siswa tetap tidak pasti. Menurut informasi yang diberikan oleh informan, sistem poin yang diimplementasikan dalam SMAN 1 Canduang melayani tujuan-tujuan berikut: meningkatkan disiplin siswa, mempersiapkan siswa untuk menjadi individu yang disiplin baik di sekolah maupun di tempat kerja masa depan, meminimalkan pelanggaran disiplin, memfasilitasi pengelolaan pelanggaran perintah siswa, dan menanamkan rasa penyesalan pada siswa yang tidak mematuhi aturan dengan menetapkan poin hukuman.

Kesesuaian tujuan program sistem poin dengan kebutuhan siswa

Tujuan utama dari program sistem poin adalah untuk mendorong perilaku siswa yang selaras dengan aturan dan berfungsi sebagai contoh positif bagi siswa lain. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan oleh peneliti dengan Kepala Sekolah, program sistem poin sangat menguntungkan bagi siswa. Diperkirakan bahwa melalui program ini, siswa yang sebelumnya telah mengabaikan aturan akan menjadi lebih taat. Ini karena disiplin dan kepatuhan terhadap aturan dianggap kualitas penting untuk kesuksesan anak. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan waka kesiswaan, juga menyatakan bahwa banyak siswa di sekolah menengah kita kurang disiplin dalam proses belajar. Pernyataan informan didukung kuat oleh guru BK, yang setuju bahwa menerapkan sistem poin sebagai bagian dari strategi disiplin dapat secara efektif mengajarkan siswa tentang tanggung jawab. Guru BK juga menekankan bahwa sistem poin memberikan kesempatan bagi siswa untuk meningkatkan perilaku mereka.

Evaluasi Input (Masukan) Program Sistem Poin Kontribusi Sumber Daya Manusia

Semua individu yang terlibat dalam menggunakan sistem poin untuk mendisiplinkan siswa ini, termasuk kepala sekolah, dewan guru, guru BK dan staf, dianggap sebagai pemangku kepentingan di sekolah. Peneliti mewawancarai kepala sekolah yang mana beliau berkata: dalam penerapan program sistem poin ini, sangat penting bagi semua pemangku kepentingan untuk terlibat secara aktif. Namun, karena banyak kasus pelanggaran siswa, seperti keterlambatan, ini belum sepenuhnya terpenuhi. Dengan demikian, tugas mendokumentasikan pelanggaran ini dilakukan oleh instruktur protes. Individu berikutnya yang terlibat dalam situasi ini adalah guru subjek dan pengawas kelas. Jika guru tidak mampu menyelesaikan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan guru dan guru piket, juga memberikan informasi serupa, menyatakan bahwa tanggung jawab untuk menerapkan sistem poin ini terletak pada guru piketer. Namun, ada kekurangan sumber daya untuk menerapkan sistem ini, dan masih ada guru yang tidak melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Terutama pada hari Jumat dan Senin, karena hari-hari ini melibatkan upacara bendera dan makan malam perayaan. Berdasarkan wawancara informan dan pengamatan lapangan, dapat disimpulkan bahwa individu yang bertanggung jawab untuk menerapkan program penerapan sistem poin untuk mendisiplinkan siswa di SMAN 1 Canduang termasuk instruktur protes, guru subjek, dan rekan-rekan.

Khususnya mengenai guru piket, karena mereka bertanggung jawab atas proses pendidikan. Namun, masih ada beberapa guru piket yang belum memenuhi kewajiban mereka seperti yang diharapkan. Selain guru yang menonjol, kepala sekolah dan perwakilan siswa juga bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi sistem poin ini, memastikan kepatuhan dengan kriteria yang dinyatakan. Ketika instruktur gagal memenuhi tugas mereka dengan baik, kepala sekolah mengeluarkan peringatan dan konsekuensi yang jelas kepada guru yang bersangkutan.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Alat dan peralatan yang diperlukan untuk penerapan sistem titik ini meliputi pagar perbatasan, fasilitas parkir, dan administrasi pendaftaran. Peneliti melakukan wawancara dengan waka sarana dan prasarana yang mana beliau berkata bahwa alat dan sumber daya yang diperlukan untuk sepenuhnya menerapkan program sistem poin kekurangan karena tidak adanya pagar perbatasan di sekolah kami. Sekolah biasanya memiliki gerbang hanya di pintu masuk depan, karena pagar di sekitar sekolah masih berfungsi. Akibatnya, siswa sekolah menengah dapat bertemu dengan anak-anak sekolah dasar saat memasuki fasilitas sekolah. Selanjutnya peneliti mewawancarai guru dan seorang guru piket keduanya mengkonfirmasi bahwa sekolah tidak memiliki penghalang perbatasan, memungkinkan anak-anak terlambat untuk masih mengakses fasilitas sekolah.

Berdasarkan pengamatan peneliti dan wawancara dengan informant, dapat disimpulkan bahwa alat dan sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan sistem poin ini tidak sepenuhnya dapat diakses. Hanya sejumlah alat yang terbatas yang tersedia karena SMAN 1 Canduang tidak memiliki alat pendukung utama, yaitu pagar perbatasan, untuk penerapan sistem poin yang efektif. Sumber daya dan persediaan yang tersisa akan disimpan oleh perwakilan pemasok dan digunakan oleh mereka dalam kolaborasi dengan komite dan entitas terkait untuk tujuan konstruksi.

Evaluasi Process (Proses) Program Sistem Poin

Waktu dan proses penerapan sistem poin

Pengenalan sistem poin untuk disiplin siswa di SMAN 1 Canduang dimulai pada semester Januari-Juni 2021 setelah keputusan kolaboratif yang dibuat oleh sekolah. Implementasi sistem ini saat ini sedang berlangsung, namun masih ada bidang yang membutuhkan perbaikan karena upaya yang tidak memadai yang dilakukan oleh guru yang bertanggung jawab atas bimbingan siswa. Data ini dikonfirmasi oleh temuan dari wawancara penelitian yang dilakukan dengan seorang informant yang bertindak sebagai waka kesiswaan yang mana beliau mengatakan, Kami telah menerapkan program sistem poin selama sekitar dua setengah tahun. Sejauh ini, kami terus berusaha untuk mematuhi sistem poin ini seperti yang dimaksudkan, meskipun dalam beberapa kasus, kami terlibat dalam diskusi untuk membuat penyesuaian berdasarkan keadaan dan kondisi yang berlaku. Penerapan sistem poin ini juga harus ditingkatkan, baik dalam hal pengetahuan guru tentang penghargaan poin dan aklisasi anak terhadap keberadaan skor tersebut.

Dari deskripsi yang diberikan oleh informant dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di SMAN 1 Canduang dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem poin untuk disiplin siswa belum berhasil. Sistem poin dalam buku 2 baris masih dalam tahap awal dan saat ini sedang dipelajari. Penerapan sistem point di SMAN 1 Canduang hanya dilakukan pada awalnya saat penciptaan program ini. Setelah itu, program ini berhenti berlaku untuk siswa. Siswa tidak menyadari jumlah poin yang telah mereka peroleh dan hanya menghadapi hukuman segera dari guru piket karena datang terlambat ke sekolah, tanpa perubahan yang dapat diamati dalam perilaku mereka.

Faktor Penghambat Penerapan Sistem Poin

Penghalang berkelanjutan untuk menerapkan sistem poin untuk menghukum siswa di SMAN 1 Canduang adalah sistem administrasi catatan yang cacat dan guru yang gagal memenuhi tugas mereka secara efektif. Ini didukung oleh wawancara dengan informant yang diidentifikasi sebagai guru yang mana beliau menyatakan sebagai berikut: Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya organisasi yang sempurna dalam administrasi, karena program sistem poin relatif baru dan rekapitulasi tidak diarahkan dengan benar. Saat ini, hanya satu catatan terbatas yang tercatat dalam buku siswa untuk saat ini. Selanjutnya peneliti mewawancarai guru yang merupakan guru biologi, menyatakan bahwa hambatan utama untuk sistem poin adalah kurangnya kejelasan tentang mekanisme pemulihan. Hanya saja, setelah didokumentasikan dalam buku kasus, itu tidak dicatat. Sayangnya, saya tidak tahu usia anak dan tidak ada informasi selanjutnya yang diberikan.

Berdasarkan wawancara dengan informant dan pengamatan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa hambatan utama dalam menerapkan sistem poin adalah kurangnya arah yang jelas, rekaman, dan pelacakan sistem titik. Guru yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan poin kepada siswa selama piket tidak mendokumentasikannya di buku kasus. Selain itu, guru BK yang bertanggung jawab untuk merekam poin yang diperoleh oleh siswa tidak memenuhi tugasnya dengan benar. Ini menunjukkan kurangnya koordinasi antara guru BK dan guru piket, serta kurangnya pemantauan dari kepemimpinan sekolah. Kepala sekolah dan waka kesiswaan tidak secara teratur mengevaluasi kemajuan yang dilakukan melalui implementasi sistem poin ini.

Evaluasi Product (Produk) Program Sistem Poin

Pencapaian Program

Efektivitas program sistem poin dapat diamati melalui meningkatnya jumlah pelanggaran disiplin di antara siswa di SMAN 1 Canduang yang menunjukkan bahwa program tersebut belum berhasil memenuhi tujuan yang diuraikan dalam rencana awal. Guru yang ketat hanya mengelola hukuman segera kepada siswa, dan poin yang diperoleh siswa tidak pernah didokumentasikan. Berdasarkan kesaksian guru piket dan guru bahasa Indonesia, telah diperhatikan bahwa guru yang bertanggung jawab atas bimbingan dan konseling siswa (BK) tidak pernah mendokumentasikan jumlah poin yang diperoleh oleh siswa atas pelanggaran mereka. Akibatnya, sekolah tidak menginformasikan siswa atau menghubungi orang tua mereka ketika mereka telah mengumpulkan jumlah poin yang ditentukan. Hal ini dikonfirmasi melalui wawancara dengan guru piket yang mengatakan bahwa ketika seorang ibu mengambil peran seorang instruktur piket, tidak ada guru lain yang mampu menetapkan kelemahan kepada siswa yang menunjukkan kurangnya disiplin. Guru secara eksklusif memberikan hukuman eksplisit kepada siswa, menghasilkan rasa akrab di antara siswa yang telah secara teratur terlibat dalam pelanggaran disiplin. Saat ini, dia secara konsisten terlambat dan telah secara khusus diperintahkan untuk terlibat dalam membaca Al-Qur'an. Pola latensi ini diperkirakan akan bertahan, dengan siswa memperlakukannya secara berulang. Ibuk tidak menyadari pencapaian program sistem poin. Siswa hanya dikenakan hukuman tanpa menerima poin untuk pelanggaran disiplin mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dari informant yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian program tidak optimal karena kurangnya poin yang didokumentasikan yang diperoleh oleh siswa. Guru yang ketat hanya mengatur hukuman langsung kepada siswa, tanpa mempertimbangkan beratnya pelanggaran mereka. Akibatnya, instruktur disiplin sekolah tidak dapat menangani pelanggaran spesifik yang dilakukan oleh anak. Efisiensi implementasi sistem poin ini tergantung pada kolaborasi yang sukses antara guru piket, guru BK, kepala sekolah, dan perwakilan siswa. dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan.

Dampak Program

Penerapan sistem poin ini memiliki efek menguntungkan pada disiplin siswa di sekolah. Ini berfungsi sebagai penghalang bagi siswa yang melanggar aturan sekolah dan mengganggu ketertiban, karena mereka menyadari poin yang akan mereka terima sebagai akibatnya. Pelakunya mungkin mempertimbangkan untuk mengulangi kejahatan. Wawancara penulis dengan guru BK yang mana beliau berkata dengan penerapan program sistem poin telah memiliki pengaruh yang signifikan pada meningkatkan disiplin siswa. Namun, karena masih dalam tahap awal, ada perubahan yang terbatas yang dapat diamati dalam perilaku siswa. Evaluasi dan perbaikan lebih lanjut diperlukan dalam berbagai aspek untuk meningkatkan disiplin. Sekolah pada awalnya menerapkan sistem ketakutan, yang akhirnya menjadi berakar sebagai praktik yang biasa dan bermanfaat bagi siswa. Selanjutnya peneliti mewawancarai guru piket mengatakan bahwa penerapan sistem poin telah memiliki efek transformasi siswa yang sudah memiliki rasa taat terhadap aturan, sementara mereka yang tidak memiliki hati nurani terus melanggarnya.

Dari wawancara dan pengamatan akademisi yang disebutkan di atas, dapat

disimpulkan bahwa penerapan sistem poin program memiliki dampak yang jelas pada disiplin siswa, meskipun tidak secara universal. Perilaku siswa yang terus-menerus melanggar norma adalah hasil dari sifat menantang dari siswa yang menentang konformasi, karena mereka tetap cenderung beradaptasi dengan masyarakat kontemporer yang terus berkembang. Perubahan sikap awal siswa hanya terlihat pada awal program. Namun, setelah program berakhir, tidak ada dukungan yang berkelanjutan, mengakibatkan siswa kembali ke pola perilaku buruk sebelumnya. Perhatian ini dapat dipertimbangkan dalam teori Behaviorist Edward Lee Thorndike, yang menyatakan bahwa perilaku manusia hanya diatur oleh hukum-hukum yang dapat diprediksi dan dapat diramalkan. Penerapan sistem poin untuk menghukum siswa di SMAN 1 Canduang akan secara efektif mendorong siswa untuk menunjukkan sikap disiplin ketika peraturan sistem poin dipertahankan. Anak-anak akan termotivasi untuk mengubah perilaku mereka ketika mereka menerima konsekuensi yang konsisten dan adil untuk tindakan mereka. Dengan memastikan bahwa semua perilaku, baik positif maupun negatif, diakui dan ditangani, anak-anak akan belajar untuk mengubah tingkah laku mereka sesuai. (Hermansyah, 2020)

Menurut SMAN 1 Canduang, penerapan sistem poin belum secara efektif meningkatkan disiplin siswa, seperti yang terlihat oleh meningkatnya jumlah pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh siswa setiap semester. Guru yang waspada yang mengawasi prosedur disiplin anak hanya memberlakukan hukuman segera, oleh karena itu tidak memberikan dampak jangka panjang pada siswa. Thorndike mengusulkan hukum yang menjelaskan hubungan antara bagian dan jawaban. Prinsip pertama adalah hukum ketersediaan. Hukum Persiapan Sebelum belajar, perlu bagi individu untuk terlibat dalam kegiatan persiapan yang menghasilkan rangsangan dan reaksi, dengan demikian memperkuat asosiasi. Guru secara konsisten menekankan kebutuhan untuk bergantung pada anak-anak, seperti memotong rambut mereka sendiri, melipat pakaian dengan benar, dan mengenakan sabuk. Jika persiapan siswa sempurna dan mematuhi aturan dan prosedur, mereka akan merasa nyaman dan siap untuk terlibat dalam proses belajar. Ini akan meningkatkan ketersediaan mereka untuk mulai belajar di pagi hari. Ini sejalan dengan Hukum Latihan, yang mengklaim bahwa belajar akan berhasil ketika diulang. Ini berarti bahwa jika guru secara konsisten memberikan bentuk penghargaan yang sama kepada siswa dan mencatat jumlah poin yang diperoleh untuk setiap pelanggaran yang dilakukan, siswa akan dihindari dari mengulangi pelanggaran mereka.

Menurut Thorndike, prinsip utama belajar adalah pengulangan. Jika seorang guru secara konsisten memberi penghargaan kepada siswa atas pelanggaran mereka, siswa akan kurang cenderung melakukan pelanggaran. Di sisi lain, jika guru lemah dalam memberikan poin untuk pelanggaran seperti itu, perilaku tidak disiplin siswa akan bertahan. Tiga hukum efek menunjukkan bahwa potensi atau kerapuhan hubungan antara rangsangan dan reaksi tergantung pada hasil yang dicapai. Ketika seseorang menerima jawaban positif, itu dihargai. Namun, jika jawaban negatif, itu tidak akan dipertahankan atau diulang. Ketika sistem poin diterapkan, respon guru kepada siswa adalah menyenangkan untuk mempertahankan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh siswa. Jika guru memberikan respon yang tepat terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh siswa, maka siswa akan menghentikan perilaku mereka. Mengenai penyebaran sistem poin di SMAN 1 Canduang.

Sepanjang kursus, murid-murid secara konsisten dan terus-menerus mengabaikan hukum. Disiplin dicari untuk kepuasan yang dibawa, bukan untuk konsekuensi dari kejahatan yang dilakukan. Seperti yang dikatakan Thorndike, tindakan diprediksi. Generasi hasil yang menguntungkan akan dimulai dan diulang. Menurut hukum persiapan Thorndike, belajar akan berhasil ketika siswa atau individu tersebut telah dipersiapkan dan siap. Persiapan dalam konteks ini mengacu pada keadaan siap dan terorganisir. Ini mencakup tugas-tugas seperti menjaga rumah bersih, berada di sekolah tepat waktu, dan pergi langsung ke kelas. Dengan mengikuti praktik ini, anak-anak akan lebih siap daripada rekan-rekan mereka. melanggar peraturan tersebut. Siswa yang melanggar aturan menunjukkan kurangnya keinginan untuk merangkul proses pendidikan dalam lingkungan sekolah. Empat Hukum

Sikap : Perilaku seseorang ditentukan oleh faktor emosional, sosial, kognitif, dan psikomotornya sendiri. Perilaku seseorang tidak hanya ditentukan oleh input eksternal. Jawabannya hanya ditentukan oleh individu. Selanjutnya, individu akan menunjukkan respon yang beragam, meskipun tunduk pada perlakuan yang sama oleh guru, berdasarkan karakter individu mereka, pengalaman hidup, dan kondisi emosional. Dalam konteks sistem poin, hasilnya dipengaruhi tidak hanya oleh respons guru tetapi juga oleh keinginan siswa individu untuk merangkul sistem dan mematuhi aturan-aturannya.

Menurut deskripsi yang diberikan, realita di SMAN 1 Canduang yang menerapkan sistem poin. Garis-garis tidak efektif dalam mengubah perilaku siswa karena rangsangan positif yang diberikan oleh guru, yang menghasilkan perasaan kepuasan di antara siswa, sehingga menghindari mereka untuk menyimpang dari pola-pola tingkah laku yang telah ditetapkan. Silakan menyelesaikan tugas tersebut. Stimulus yang diberikan oleh guru mencakup semua instruksi dan pedoman yang diberikan kepada siswa untuk memancing. Pertimbangkan skenario sekolah di mana seorang guru berpakaian baik sebagai contoh. Reaksi siswa terhadap rangsangan adalah sementara.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada evaluasi penggunaan sistem poin dalam disiplin siswa di SMAN 1 Canduang dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem poin menyimpang dari peraturan yang diperlukan dan teori yang mapan. Guru menahan diri dari mendokumentasikan pelanggaran disiplin terhadap siswa dan sebaliknya mengelola konsekuensi segera, bertujuan untuk mempromosikan lingkungan yang positif dan menghindari kasus-kasus perilaku tidak disiplin yang berulang. Pelanggaran disiplin dalam SMAN 1 Canduang secara konsisten meningkat setiap semester karena guru memberikan rangsangan dan respons kepada siswa yang menantang teori dan peraturan yang ada. Peneliti berharap kedepannya program sistem poin ini lebih di peretat lagi dalam melaksanakan sistem poin ini supaya lembaga pendidikan ini siswanya lebih di siplin sehingga bisa membuat kualitas pendidikan ini lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, M., Batubara, J., & Deliani, N. (2024). The central role of the Quran in the development of the Islamic educational paradigm. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 9(1), 25–38.
- Akhyar, M., Iswantir, M., Febriani, S., & Gusli, R. A. (2024). Strategi Adaptasi dan Inovasi Kurikulum Pendidikan Islam di Era Digital 4 . 0. *Instructional Development Journal (IDJ)*, 5(1), 18–30.
- Chrimayanti, Agus, & Sudirman. (2022). Penerapan Sistem Poin Dalam Peningkatan Kedisiplinan Peserta Didik Di UPT SMAN 5 Tana Toraja. *Tomalebbi*, 9(4), 243–248.
- Desiyanto, Pantiwati, & Tinus. (2018). Implementasi Kebijakan Sistem Poin Pelanggaran Dalam Upaya Membentuk Siswa Berkarakter SMA Islam Yakin Tuter Pasuruan. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 6(1), 86–100.
- Fitriawati, Sulistiyorini, & Parijo. (2017). Penerapan Sistem Poin Dalam Menanggulangi Siswa Yang Melanggar Aturan di SMA N 2 Pontianak. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 4(6), 11.
- Gusli, R. A., Iswantir, M., & Akhyar, M. (2023). KONSEP MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN LEMBAGA ISLAM DI MTs S SUNGAI RAMBAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN. *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 4(2), 61–78.
- Gusli, R. A., Iswantir, M., Akhyar, M., & Lestari, K. M. (2024). Inovasi kurikulum pendidikan Islam Era 4 . 0 di MTsN 1 Pariaman. 5(2), 77–88. <https://doi.org/10.32832/idar.v5i2.16401>
- Hermansyah. (2020). Analisis teori behavioristik (Edward Thorndike) dan implementasinya

- dalam pembelajaran SD/MI. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 7(1), 15–25.
- Ipnu Wulandari. (2020). Penerapan Program Sistem Poin Di Smk Negeri 2 Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 9(4), 120.
- Mallaena, A. A., Yusuf, M., & Hasbi. (2023). Kinerja guru bimbingan konseling dan implikasi penerapan sistem poin pelanggaran terhadap kedisiplinan siswa. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 11(3), 183. <https://doi.org/10.29210/199100>
- Mudjiyanto. (2018). Metode penelitian evaluasi komunikasi. *Promedia*, 4(1), 76–102.
- Sari, Ilmi, Iswantir, & Jasmienti. (2023). Pelaksanaan Kedisiplinan Siswa Melalui Sistem Poin di SMA Negeri 2 Kec. Bukik Barisan. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 2(1), 179-205.
- Setyawan, Astuti, & Ekojono. (2017). Sistem Pencatatan Poin Pelanggaran Siswa Pada Sma Negeri 1 Purwosari. *Jurnal Informatika Polinema*, 1(1), 13.
- Soedarsono. (2013). *Karakter Mengenal Bangsa Gelap Menuju Terang*. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Bandung*. Alfabeta.
- Sukmadinata. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.